

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran merupakan hal yang akan selalu muncul didalam perekonomian, dimana saat pengeluaran agregatnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi yang telah tersedia didalam perekonomian untuk dapat menghasilkan barang-barang dan juga jasa (Prasaja, 2013). Salah satu alasan pengangguran selalu muncul didalam pengangguran adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (*job search*) adalah suatu proses seseorang untuk mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan juga keterampilan sesuai yang dimiliki oleh mereka. Namun, jika semua pekerja dan pekerjaan tidak ada bedanya, maka tidak menutup kemungkinan bagi para pekerja bahwa mereka cocok dengan pekerjaan apa saja, akan tetapi pada kenyataannya bakat dan juga kemampuan seseorang itu berbeda-beda (Mankiw dkk, 2012).

2.1.1.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Qothrunnada (2022) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan

oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan.

2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bias juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Bila ditinjau dari sebab-sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu:

1. Pengangguran Friksional (*Transisional*).

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri.

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

Pengangguran ini terjadi karena maju-mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memberhentikan karyawannya.

4. Pengangguran Musiman (Seasonal)

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim, misalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah mereka akan bekerja selama musim panen setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah dan hemat biaya.

6. Pengangguran Politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya penutupan Bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK.

7. Pengangguran Deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

2.1.1.2 Kebijakan Pemerintah Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran

Indonesia sebagai negara berkembang sampai saat ini masih belum bisa dipisahkan dari masalah-masalah sosial yang mencengkeram masyarakatnya, terutama masalah sosial ekonomi serta masalah lapangan pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan demi terciptanya kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi masalah pengangguran.

1. Kebijakan Subsidi

Subsidi tidak berupa aktivitas pemerintah secara langsung tetapi lebih kepada dorongan lingkungan secara lokal maupun nasional sedemikian rupa sehingga aktivitas perekonomian berjalan secara optimum. Kebijakan subsidi tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen yang memuat bermacam-macam insentif, daya tarik, kemudahan-kemudahan untuk merangsang investasi baru dan perluasan proyek.

2. Bantuan Infrastruktur

Pemberian bantuan infrastruktur oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi pengangguran yang ingin memiliki tempat usaha.

3. Program Pelatihan dan Kemitraan.

Program ini adalah program umum diterapkan untuk mendorong pertumbuhan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Adapun beberapa contoh programnya antara lain, meningkatkan keterampilan masyarakat, memberikan keterampilan spesifik kepada masyarakat yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan, memberikan keterampilan dasar umum untuk menanamkan strategi memperoleh lowongan kerja atau berwirausaha.

4. Kebijakan Upah

Kebijakan untuk menerapkan formula pada penghitungan Upah Minimum juga disambut baik karena memberikan kepastian, baik kepada pengusaha maupun buruh, tentang kenaikan upah yang bakal diterima buruh setiap tahun dengan besaran yang terukur.

5. Bantuan Pinjaman

Bantuan pinjaman sering diberikan atas keputusan pemerintah karena akses terhadap pasar modal rendah dan guna membantu pengangguran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

2.1.2 Inflasi

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand agregat*) relatif

terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (temporer) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang saja yang tidak berdampak bagi kenaikan harga barang lain tidak bisa disebut dengan inflasi. Kenaikan musimanpun, seperti kenaikan harga pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri, Natal atau tahun baru tidak bisa disebut dengan inflasi, karena kenaikan tersebut bersifat sementara dan tidak memiliki pengaruh lanjutan. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya. Karena kenaikan ini berlangsung secara terus menerus maka perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk dapat mengendalikannya, yaitu dengan kebijakan moneter untuk kembali menstabilkan perekonomian. Sesuai dengan pernyataan dari Julius R. Latumaerissa (2011) definisi singkat dari inflasi ialah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus. Selain terjadi secara terus menerus, kenaikan harga bisa disebut dengan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mencakup keseluruhan jenis barang. Sesuai dengan pernyataan dari (Sirilius Seran, 2017) inflasi ialah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Inflasi tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara.

Beberapa sebab yang dapat menimbulkan inflasi antara lain pemerintah terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah

pada tingkat harga yang berlaku berbagai golongan dalam masyarakat berusaha memperoleh tambahan pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan produktifitas mereka, adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan keluarnya yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan, adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi yang mendorong kenaikan harga, pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga, pengaruh inflasi luar negeri, khususnya bila negara yang bersangkutan mempunyai sistem perekonomian terbuka. Pengaruh inflasi luar negeri ini akan terlihat melalui pengaruh terhadap harga-harga barang impor (Dwi Eko Waluyo, 2009). Ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi.

1. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik apabila menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu; satu bulan, triwulan, atau satu tahun. Perbandingan harga juga bisa dilakukan berdasarkan patokan musim. Misalnya di musim panceklik pada umumnya harga beras akan mengalami kenaikan dan akan lebih mahal bila dibandingkan dengan harga beras pada musim panen.

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditi belum dapat menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi apabila kenaikan harga tersebut tidak mengakibatkan harga-harga secara umum naik. Misalnya, apabila pemerintah menaikkan harga

BBM (Bahan Bakar Minyak), pada umumnya harga-harga komoditas lain akan ikut naik karena BBM merupakan komoditi strategis, dimana sebagian besar kegiatan ekonomi memerlukan BBM, sehingga kenaikan harga BBM akan merambat pada kenaikan komoditas lainnya. Naiknya harga BBM ini dapat menimbulkan terjadinya inflasi.

3. Berlangsung Terus Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan mengakibatkan inflasi apabila kenaikan harga tersebut terjadi hanya sesaat. Karena perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam jangka waktu satu bulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Ukuran inflasi yang paling banyak digunakan ialah indek harga konsumen (IHK) yang juga dikenal dengan *consumer price index* (CPI). CPI mengukur pembelian standar untuk barang pada waktu yang beralainan, meliputi harga makanan, pakaian, perumahan, bahan bakar, transportasi, perawatan medis, biaya perkuliahan, dan barang juga jasa lain yang dibeli untuk kehidupan sehari-hari.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Inflasi

Adapun jenis-jenis inflasi digolongkan menjadi 3 bagian (Siregar, 2010).

1. Berdasarkan derajatnya

Berdasarkan derajatnya inflasi dibedakan menjadi empat golongan, yaitu :

a. Inflasi ringan (inflasi merayap)

Disebut juga *Creeping Inflation*. Inflasi ringan adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada pada posisi

satu digit atau dibawah 10% pertahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil dalam jangka waktu relatif lama.

b. Inflasi sedang (inflasi menengah)

Inflasi sedang atau menengah ini merupakan inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada diantara 10-30% per tahun dan diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.

c. Inflasi berat

Merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada diantara 30-100% pertahun. Pada kondisi demikian, sektor-sektor produksi hampir lumpuh total, kecuali yang dikuasai negara. Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan berjalan dalam waktu relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya hargaharga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya.

d. Inflasi sangat berat

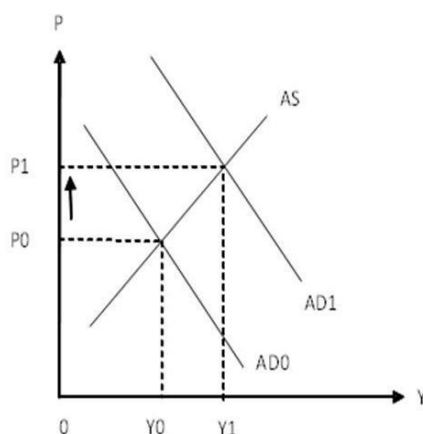
Disebut juga *Hyper Inflation*, adalah inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100% pertahun. Dalam kondisi ini, harga-harga barang naik menjadi lima atau enam kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara pesat. Biasanya kondisi ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibiayai/ditutupi dengan mencetak uang.

2. Berdasarkan penyebabnya

Apabila ditinjau berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu:

a. *Demand Pull Inflation*

Disebut juga inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan, inflasi ini biasanya terdapat pada masa perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia. *Permintaan aggregate* meningkat lebih cepat (misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah) dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, akibatnya terjadi inflasi.



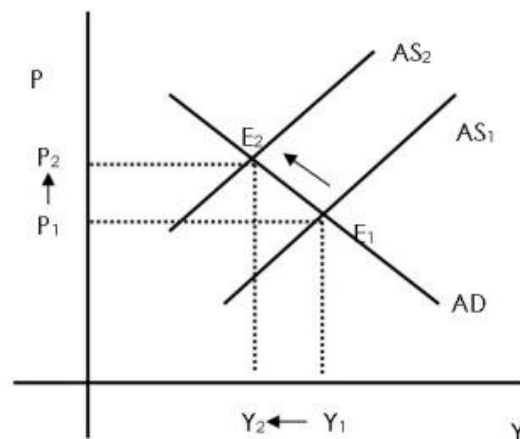
Sumber: Siregar, 2010

Gambar 2.1 Demand Pull Inflation (Inflasi Tekanan Permintaan)

Gambar 2.1 menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat kenaikan permintaan. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva permintaan agregat dari AD_0 menjadi AD_1 yang mendorong harga naik dari P_0 menjadi P_1 . Kenaikan harga ini menimbulkan terjadinya inflasi. Akibat kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional bertambah dari Y_0 menjadi Y_1 .

b. Cost Push Inflation

Inflasi ini terjadi bila ada biaya produksi mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan-kenaikan input lainnya yang mungkin semakin langka dan harus diimpor dari luar negeri.



Sumber, Siregar, 2010

Gambar 2.2 Cost Push Inflation (Inflasi Dorongan Biaya)

Gambar 2.2. menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva penawaran agregat dari AS_1 menjadi AS_2 yang mendorong harga naik dari

P_1 menjadi P_2 . Kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional berkurang dari Y_1 menjadi Y_2 .

3. Berdasarkan asalnya

Apabila ditinjau berdasarkan asal inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Dimana inflasi ini timbul bisa saja karena defisit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dan lain sebagainya sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang-barang dalam negeri secara umum dan berkesinambungan.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

yaitu inflasi yang bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan produksi.

2.1.2.2 Tinjauan Teoritis Tentang Inflasi

Terdapat berbagai macam teori yang menjelaskan inflasi dari sudut pandang yang berbeda, Teori-teori tersebut yaitu, Teori Kuantitas Uang, Keynesian Model, Mark-up Model dan Teori Struktural .

1. Keynesian Model

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia

(penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum *monetarist*, *Keynesian models* ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama (heterogen), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* barang (*inflationary gap* menghilang).

2. Mark-up Model

Teori ini mendasarkan pemikiran bahwa inflasi ditentukan oleh dua komponen, yaitu *cost of production* dan *profit margin*. Dengan demikian, ketika terjadi kenaikan biaya produksi menyebabkan turunnya keuntungan perusahaan, yang berdampak kepada kenaikan harga jual komoditi di pasar.

3. Teori Struktural

Banyak studi mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga

merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga, guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*, utang luar negeri, dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.

2.1.3 Investasi

Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi / pendapatan di masa yang akan datang (Dornbuch, 2004). Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi netto). Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang – barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses dan barang jadi. Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang – barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan memungkinkan keuntungan untuk dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.

Pengeluaran investasi dapat juga meliputi pengeluaran yang ditambahkan pada komponen – komponen barang modal. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini kegiatan investasi dapat dibedakan atas investasi otonom dan investasi yang terdorong (Harjati, 2005).

Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya jenis investasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan – jalan, jembatan – jembatan, dan infrastruktur lainnya. Sedangkan investasi terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Dengan demikian investasi otonom dan investasi diharapkan akan meningkatkan permintaan, yang pada gilirannya akan mendorong investasi. Penggairahan iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua undang-undang ini kemudian dilengkapi dan disempurnakan, dimana UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970. Dapat dilihat di bawah ini penjelasan UU PMDN dan PMA sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah : bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
 - b. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam UndangUndang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan - ketentuan Undang-Undang ini.
2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan - ketentuan Undang - undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung

menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja, ini sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain

- 1) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- 2) Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
- 3) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

2.1.3.1 Tujuan Investasi

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

1. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.

2. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh tingkat inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Saat ini banyak sekali sarana yang dapat digunakan untuk investasi seperti dalam aset keuangan instrument investasi terdiri dari deposito, saham sukuk, dan lain-lain. Pada dasarnya kegiatan investasi adalah berkaitan dengan *risk and return*. Semakin besar return yang dijanjikan dari suatu instrument, maka semakin tinggi pula risk yang mengikuti return tersebut. Namun instrumen investasi yang berpendapatan tetap secara prinsip syariah dilarang. Hubungan antara return and risk dari suatu investasi bergerak searah dan linear. Investasi yang direncanakan Negara memiliki berbagai latar belakang penyebab. Investasi yang dilakukan Negara dapat dikelompokkan kedalam beberapa alasan, yaitu :

- a. Investasi Penggantian

Jika suatu perusahaan telah memiliki seperangkat alat produksi yang telah digunakan beberapa tahun, akhirnya perusahaan akan sampai juga pada akhir umur ekonomis dan umur teknis alat produksi tersebut. Maka perusahaan

harus mengalokasikan sejumlah dana untuk mengganti alat produksi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Investasi Penambahan Kapasitas

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu, pasti memerlukan alat produksi yang mendukung pertumbuhan penjualan tersebut. Berarti perusahaan harus membeli peralatan produksi baru yang sesuai dengan kapasitas produksi yang diperlukan.

c. Investasi Penambahan Jenis Produk Baru

Pertumbuhan penjualan dan bisnis suatu perusahaan sering kali tidak selalu melalui penjualan satu jenis produk saja. Hal itu mengakibatkan perusahaan memerlukan peralatan produksi baru, yang belum dimiliki sebelumnya.

d. Investasi lain-lain

Terdapat berbagai kemungkinan yang dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan investasi baru diluar tiga alasan yang dibahas di halaman sebelumnya. Tetapi pada intinya, berbagai peluang usaha dan harapan pertumbuhan usaha yang dilihat oleh perusahaan akan memicu terjadinya investasi pada berbagai peralatan produksi.

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan. Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi di masa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan

komponen yang paling mudah berubah. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi diantaranya nilai tukar, suku bunga, inflasi, dan infrastruktur.

- a. Pengaruh Nilai Tukar Secara teoritis dampak perubahan nilai tukar dengan investasi bersifat tidak pasti. Shikawa, mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala tersebut pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada alokasi modal pada investasi. Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan, sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

- b. Tingkat bunga dan investasi

Peningkatan permintaan terhadap dana pinjaman akan mendorong tingkat bunga, bunga equilibrium. Tingkat bunga yang melebihi tinggi akan mengurangi arus modal keluar neto. Permintaan investasi juga bisa berubah

karena pemerintah mendorong atau membatasi investasi melalui undang – undang pajak. Sebagai contoh, anggaplah pemerintah menaikkan pajak pendapatan perorangan dan menggunakan penerimaan tambahan tersebut untuk mengurangi pajak bagi orang-orang yang ingin menginvestasikan dananya kedalam modal baru. Perubahan dalam undang-undang pajak seperti itu membuat banyak proyek investasi lebih menguntungkan dan seperti inovasi teknologi, meningkatkan permintaan akan barang – barang investasi.

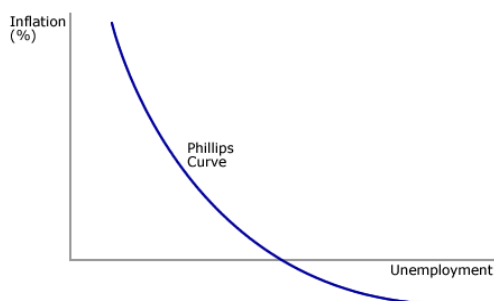
c. Pengaruh Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi, hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Di samping itu, tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

d. Pengaruh Infrastruktur

Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternative pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

2.1.4 Teori A.W.Phillips



Sumber: Amri Amir, 2008

Gambar 2.3 Kurva Phillips

A.W. Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) tingkat pengangguran akan berkurang.

Bentuk kurva Phillips memiliki kemiringan menurun, yang menunjukkan hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran rendah, ataupun sebaliknya. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi bersamaan, artinya jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, sebagai akibatnya harus menanggung beban inflasi yang tinggi.

Dengan kata lain, kurva ini menunjukkan adanya *trade-off* (hubungan negatif) antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu tingkat pengangguran akan selalu dapat diturunkan dengan mendorong kenaikan laju inflasi, dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran. Inflasi dapat dikaitkan secara langsung dengan besarnya pengangguran yang terjadi. Hal ini dapat diketahui pada kaitan antara tingkat inflasi (upah) dengan tingkat pengangguran yang ditunjukkan dengan kurva Phillips. Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah.

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output).

Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	“Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia” (Soekapdjo & Oktavia, 2021)	- Inflasi	- IPM - UMP	Secara parsial inflasi dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia, sedangkan UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.	Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, Vol. 5 No. 2, September 2021
2.	“Pengaruh PDRB, Infalsi, PMDN Dan PMA Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun 2008-2013” (Fahcry, 2016)	- Inflasi	- PDRB	Secara parsial PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran.	https://dsp.ace.uii.ac.id/handle/123456789/32429

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	“Pengaruh inflasi, jumlah penduduk, IPM, PMA, dan PMDN terhadap tingkat pengangguran di indonesia (Astrid & Soekapdjo, 2020)	- Inflasi - PMA - PMDN	-	Jumlah Inflasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. IPM, dan PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Jumlah penduduk dan PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.	http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/
4.	“Pengaruh pendidikan dan investasi terhadap pengangguran di jawa” (Karisma et al., 2021)	- PMA - PMDN	-	Pendidikan tidak berpengaruh terhadap pengangguran di pulau Jawa. Investasi yang berupa penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pengangguran. Investasi yang berupa penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pengangguran di pulau Jawa.	Journal of Economic, Business and Accounting Volume 5 Nomor 1, Desember 2021 e-ISSN : 2597-5234

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	“Analisis pengaruh jumlah penduduk, penanaman modal dalam negeri (pmdn), pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di indonesia tahun 2000-2020” (Pandiangan et al., 2016)	Inflasi - PMDN	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia periode 2000-2020.	https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
6.	“Pengaruh Pdrb Riil Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Kota Medan” (Siregar, 2017)	Inflasi	- PDRB Riil	Berdasarkan uji-F variabel PDRB (X1) dan variabel Inflasi (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan uji-T variabel PDRB Riil berpengaruh secara positif	Jurnal Ilmiah Methonomi Vol. 2 No. 1 (Januari – Juni 2016)

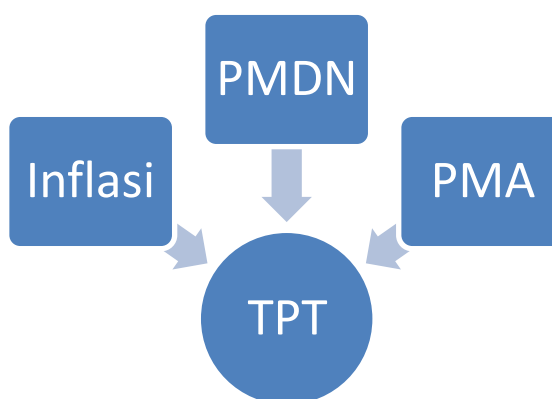
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. variabel Inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.	
7.	“Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan investasi terhadap pengangguran terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011” (Sarimuda, 2014)	- Inflasi - PMA	- PDRB - UMK	PDRB, UMK dan investasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka sedangkan inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.	Jurnal ekonomi an bisnis, no.2 Agustus 2014
8.	“analisis pengaruh PDRB, UMP, investasi, dan penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka jawa tengah 2003-2018” (Pratama et al., 2020)	- invesatasi	- PDRB - UMP - Penduduk	Secara bersama-sama variabel laju PDRB, upah minimum provinsi, investasi dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat	DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 2 Nomor 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pengangguran terbuka, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.	
9.	“Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia 2001-2017” (Pakerti, 2020)	inflasi	- Pertumbuhan ekonomi	Berdasarkan hasil regresi variabel inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak terdapat signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 9. No.1, Januari - April 2020 ISSN: 2303-1220
10.	“Do trade-off inflation and unemployment happen in indonesia?” (Kurniasih & Kartika, 2020)	Inflasi	- pengangguran	<i>In the short-term relationship between unemployment is positive but insignificant which means in short-term there will be not trade-off between</i>	<i>International Journal of Economics, Business Management Research</i> Vol. 4, No. 04; 2020 ISSN: 2456-7760

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>unemployment and inflation in Indonesia. However, in the long run the relationship between unemployment and inflation is negative and significant.</i>	

2.3 Kerangka Pemikiran

Permasalahan pengangguran terbuka memang sangat kompleks untuk dibahas, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran dan indikator yang mempengaruhi antara lain ialah inflasi, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing.



Gambar 2.4 Model Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini, penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

1. Diduga bahwa inflasi, PMDN, dan PMA secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.
2. Diduga bahwa besarnya inflasi, PMDN, dan PMA secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.